

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aksinudin, S. (2022). *Hukum Pertanahan (Mengurai Kompleksitas Problem Pertanahan di Indonesia)*. Malang : Intelegensia Media.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian*, Fakultas Ushuluddin. Bandung: Uin Sunan Gunung Jati Bandung.
- Gainau, M. (2016). *Pengantar Metode Penelitian* . Bandung: PT. Kasinisius.
- Harsono, b. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media.
- Indra, I., & Cahyaningrum, I. (2019). *Cara Muda Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Parlindungan, A. (1993). *Komentar atas Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: PT. Presindo.
- Santoso, U. (2005). *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- _____, (2012). *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- _____, (2012). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- _____, (2017). Perolehan Hak Atas Tanah. In *Perolehan Hak Atas Tanah* (pp. 23-25). Depok: Kencana.
- _____, (2017). In *Perolehan Hak Atas Tanah* (pp. 25-31). Depok: Kencana.
- Soekanto, S.(1982). *Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Cv.Rajawali
- _____, (1985). *Penelitian Hukum Normati 'Suatu Tinjauan Singkat'*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemadiningrat, H. O., & Susanto, A. F. (n.d.). *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*. Bandung.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utretch, E., & Djidang, M. S. (2013). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Ichtiar Baru.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Pendaftaran Tanah (UUPT)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan (HAK GUNA BANGUNAN), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pakai (HP) atas tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Pengelolaan, Hak, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

C. Sumber Hukum Lainnya

Atmadja, I. D. (2013). *Filsafat Hukum-Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press.

Fathoni, M. Y. (2018). . Lingkup dan Implikasi Yuridis Pengertian “Agraria” Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Justisia jurnal Hukum*, 2, 356.

Hajati, S. (2005). *Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaruan Hukum Agraria Nasional. Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar*, 9.

Ronsumbre, M. M. (2013). *Penyelesaian Sengketa Penguasaan Tanah Hak Ulayat Keret Rumbiak Sebagai Kepastian Hukum Dalam Pengadaan*

*Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Di Kabupaten Biak Numfor
Provinsi Papua.* Yogyakarta: Atmajaya.

Santoso, U. (2015). Perolehan Tanah oleh Pemerintah Daerah yang Berasal dari Tanah Hak Milik. *Jurnal Perspektif*, 1.

Saskara, & Wisanjaya. (2021). Penguasaan fisik Bidang Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah. *Kertha semaya*, 9.

Setiawan, A. (2017). Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Mimbar Justicia*, 3, 204.

Zulfikar, A. (2022, Februari 28). Retrieved from Berita 99.co:
<https://berita.99.co/panduan-pendaftaran-tanah/>